

**PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI PERWUJUDAN CIVIC
PARTICIPATORY DI DESA BLORONG KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR¹**

Oleh :

Dwi Hastuti, Rusnaini & Erna Yuliandari²

Alamat E-mail: dwihastuti578@gmail.com

ABSTRACT

The objective of research was to find out: (1) the participation of Village Community Empowerment Institution in implementing Village Development as the Manifestation of Civic Participatory in Blorong Village, Jumantono Sub District and Karanganyar Regency and (2) the factors affecting the participation of Village Community Empowerment Institution in implementing Village Development as the Manifestation of Civic Participatory in Blorong Village, Jumantono Sub District and Karanganyar Regency. This research employed qualitative method with a single embedded case study approach. The data source was obtained from informant, place and event, and documentation. The sampling technique used was purposive sampling. Techniques of collecting data used were interview, observation, and document analysis. Data validation was conducted using data and method triangulations. Meanwhile, technique of analyzing data used was an interactive model of analysis encompassing: (1) Data collection, (2) data reduction, (3) data display, and (4) conclusion drawing. The procedure of research included: (1) preparation, (2) data collection, (3) data analysis, and (4) research report writing. Considering the result of research, the following conclusion could be drawn. (1) The participation of Village Community Empowerment Institution in implementing Village Development as the Manifestation of Civic Participatory in Blorong Village is not optimal. It could be seen from its participation in each of stages in the development of Blorong Village from planning, implementation, development and utilization of development results. (2) The participation of Village Community Empowerment Institution in implementing development was affected by factors included: first, allowances for members of LPMD. Second, regulation of LPMD. Third, support from society. Fourth, stranded good communication between LPMD and society. Meanwhile, inhibiting factors included: first, gradual fund issuance. Second, low awareness of LPMD. Third, low trust society to village government showed with society's prejudice and dissenting opinion. Fourth, as well as the lack of openness Village Government.

Keywords: *Participation, Village Community Empowerment Institution, Village Development, Civic Participatory*

¹ Artikel Penelitian

² Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh setiap negara, baik itu negara yang telah maju maupun negara-negara yang masih berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah-daerah. Pelaksanaan pembangunan nasional ditujukan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia, Salah satunya melalui program pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Nurcholis (2011: 4) berpendapat bahwa "Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat terjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan". Untuk itu kedudukan desa sangat penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 1 ayat 21 Permendagri No. 114 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Berdasarkan Pasal tersebut dimaksudkan alokasi dana desa untuk keberlangsungan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Keempat bidang tersebut merupakan cakupan dari pembangunan Desa yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh Kepala Desa. Setelah itu perencanaan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa guna untuk membahas dan menyepakati perencanaan pembangunan tersebut. Untuk itu dalam merencanakan pembangunan tentunya memperhatikan kebutuhan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat agar hasil pembangunan tepat sasaran.

Namun kenyataannya, pelaksanaan pembangunan desa selama ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum tepat sasaran. Salah satunya dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusida (2014: 3) menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Kuma Selatan dalam

perencanaan pembangunan khususnya pada forum musrenbang desa masih rendah, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa, kurangnya pemahaman masyarakat untuk ikutserta dalam perencanaan serta masyarakat bersikap apatis.

Sejak diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa diantaranya adalah pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Adanya hak istimewa tersebut memberi kebebasan kepada Desa untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tentu setiap Desa memiliki lembaga-lembaga masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa agar program dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan lembaga penyalur aspirasi masyarakat, tentunya dalam desa terdapat lembaga-lembaga tersebut. Dalam UU No. 6 tahun 2014 disebutkan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk membantu pelaksanaan Pemerintahan Desa serta sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa. Salah satunya adalah LPMD kepanjangan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, anggota Lembaga ini dibentuk atas

usulan dari masyarakat sebagai perwakilan dari setiap dukuh yang ada di Desa.

Berkaitan dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pasal 21 ayat 1 dalam Perda Kab. Karanganyar No 11 tahun 2015) antara lain sebagai berikut

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Blorong pada tahun 2016 yang membahas mengenai perencanaan pembangunan pada tahun 2017 yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh-tokoh desa. Berdasarkan Hasil Musrenbangdes tersebut, menunjukkan bahwa masih ada beberapa jenis kegiatan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti perluasan kantor desa, pagar dan pendopo. Untuk kebutuhan masyarakat Desa Blorong sendiri ialah perbaikan infrastruktur jalan karena masih ada beberapa jalan yang mengalami kerusakan-kerusakan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa belum sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan melainkan hanya untuk

kepentingan Pemerintah Desa sendiri.

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan di atas, maka sangat penting melakukan penelitian yang berisi partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai perwujudan *civic participatory* di Desa Blorong Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud 1) Untuk mengetahui partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa sebagai perwujudan *civic participatory* di Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa sebagai perwujudan *civic participatory* di Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian mengenai partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai perwujudan *civic participatory* di Desa Blorong Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

A. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang berupa narasumber (informan), tempat dan peristiwa serta dokumentasi, untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Narasumber (informan)

Narasumber (informan) yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Kasi Pembangunan Kecamatan Jumantono, Kepala Desa Blorong, Kaur Pembangunan, Ketua dan anggota LPMD Desa Blorong, Kepala Dusun di Desa Blorong, Ketua RT, Ketua RW, dan masyarakat Desa Blorong.

Narasumber memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Narasumber ialah orang yang dapat memberikan informasi mengenai suatu hal yang dibutuhkan oleh peneliti. Sutopo (2002: 50) berpendapat, "Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya". Dari sumber data narasumber akan memperoleh data berupa kata-kata maupun kalimat.

2. Tempat dan Peristiwa

Peneliti melakukan penelitian ini di Desa Blorong, Kecamatan

Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Serta peristiwa dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Pembangunan Desa. Melakukan pengamatan pada tempat dan peristiwa, maka peneliti dapat mengetahui proses sesuatu dapat terjadi lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Mengenai pengertian tempat, Idrus (2009: 61) berpendapat, "Tempat adalah lokasi berlangsungnya aktivitas yang dilakukan narasumber atau informan, sedangkan peristiwa atau aktivitas adalah kegiatan yang pernah dilakukan oleh informan".

3. Dokumen dan arsip

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data monografi Desa Blorong
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 26 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d. Daftar skala prioritas pembangunan Desa Blorong tahun 2016
- e. Laporan Hasil Musrenbang Desa
- f. Daftar hadir pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2016
- g. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan
- h. Foto kegiatan pembangunan di Desa Blorong

B. Teknik Pengambilan Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Teknik pengambilan subyek dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel subyek penelitian untuk mewakili informasinya dengan kelengkapan dan kedalamannya serta tidak perlu ditentukan jumlah sumber datanya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kasi Pembangunan Kecamatan, Kepala Desa, Kaur Pembangunan, Anggota LPMD, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur karena peneliti sudah mengetahui tentang informasi yang akan diperoleh. Wawancara terstruktur dalam penelitian ini berupa pertanyaan yang tertulis.

2. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan di Desa Blorong untuk memperoleh data mengenai partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan Pembangunan Desa. Observasi merupakan teknik yang

dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi di lapangan baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian.

3. Analisis Dokumen

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto dan dokumen-dokumen mengenai partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa. Teknik ini digunakan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Menurut Arikunto (2010: 274), metode dokumentasi yaitu "mencarai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya".

D. Teknik Uji Validitas Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Triangulasi data digunakan untuk menutup kemungkinan adanya kekuarangan data dari sumber data yang lain. Sumber data yang digunakan adalah narasumber (informan), tempat dan peristiwa, serta dokumen dan arsip. Sedangkan triangulasi metode digunakan untuk memperoleh data yang sejenis dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi dan studi dokumen

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan analisis data model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992: 12-19), siklus analisis model interaktif yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data tempat penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data.

Reduksi data diartikan sebagai data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan atau pemfokus, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung yang diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti mulai memfokuskan wilayah penelitian sampai data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian sampai laporan akhir tersusun lengkap.

3. Penyajian data.

Penyajian data yaitu, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan saat penelitian dilakukan untuk pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun

pola-pola pengarahannya, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi, dan alur sebab akibat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai perwujudan civic participatory di Desa Blorong.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LPMD di Desa Blorong terlibat dalam tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan namun belum optimal. Partisipasi LPMD sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dikarenakan sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang menampung aspirasi masyarakat di bidang pembangunan dan mengetahui langsung mengenai kebutuhan dan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Blorong dalam melaksanakan pembangunan desa bisa ditunjukkan dalam beberapa tahapan pembangunan sebagai berikut:

a. Partisipasi LPMD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Blorong belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang

menyatakan bahwa lembaga ini menampung dan menyalurkan usulan dari masyarakat mengenai pembangunan melalui pertemuan RT maupun Musdus. Namun LPMD hanya sebatas menampung dan menyalurkan usulan tersebut kepada Kepala Desa. Kemudian yang menyusun perencanaan adalah Kepala Desa, sehingga hal ini menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan adalah Kepala Desa. Perencanaan pembangunan tersebut kemudian disampaikan didalam Musrenbangdes untuk disepakati oleh seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang menghadiri musyawarah tersebut. Untuk pelaksanaan Musrenbangdes, LPMD Desa Blorong dilibatkan didalamnya.

b. Partisipasi LPMD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Blorong berjalan secara baik dan optimal. Keikutsertaan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan yakni dengan menggerakkan gotong-royong masyarakat. Masyarakat desa masih menerapkan gotong-royong untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, hal ini mengingat dana yang masuk ke desa ditunjukkan untuk berbagai kegiatan sehingga harus merata dalam penggunaan dana tersebut. Selain itu, LPMD juga ikut mengawasi dan mengontrol

pelaksanaan pembangunan serta juga terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat dukuh.

- c. Partisipasi LPMD dalam evaluasi pembangunan desa di Desa Blorong belum optimal. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara disimpulkan bahwa LPMD tidak dilibatkan dalam kegiatan evaluasi pembangunan di tingkat dukuh melainkan yang dilibatkan adalah panitia pembangunan yakni perangkat desa dan masyarakat setempat yang ditunjuk. Sedangkan pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan di tingkat diadakan pada setiap akhir tahun. Kegiatan evaluasi di tingkat desa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat salah satunya adalah LPMD sebagai lembaga perwakilan. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk perbaikan pembangunan untuk kedepannya.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Blorong. Pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Blorong meliputi menikmati hasil serta pemeliharaan pembangunan tersebut. Salah satu pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan di Desa Blorong pada tahun 2015 yaitu pengecoran jalan penghubung dukuh Daren Wetan dan Daren Kulon. Lahan di Desa Blorong didominasi oleh lahan

pertanian sehingga jalan persawahan harus diperhatikan, hal ini dikarenakan dengan adanya pengecoran jalan ini akan berdampak pada peningkatan hasil pertanian. Hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai perwujudan civic participatory di Desa Blorong.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Blorong menunjukkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi partisipasi LPMD dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai perwujudan *civic participatory*. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi partisipasi LPMD di Desa Blorong tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Faktor yang mendukung partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan antara lain: Pertama, adanya tunjangan bagi anggota LPMD yang bersifat administrasi guna menunjang anggota LPMD dalam

melaksanakan tugasnya. Kedua, adanya peraturan mengenai LPMD. Diatur lebih khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ketiga, dukungan dari masyarakat. Masyarakat desa yang bersedia memberikan usulan-usulan mereka untuk ditampung dan disalurkan oleh LPMD sehingga memudahkan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Keempat, menyampaikan informasi yang belum diketahui oleh masyarakat.

- 2) Faktor yang menghambat partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan antara lain: Pertama, pencairan dana secara bertahap, hal ini dapat menghambat partisipasi LPMD lebih khususnya dapat menghambat sosialisasi dari LPMD kepada masyarakat desa. Kedua, masih rendahnya kesadaran LPMD, dimaksudkan kadang-kadang anggota LPMD harus diperintah dari Pemerintah Desa terlebih dahulu yang jelas-jelas LPMD harus terlibat. Ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa Masyarakat sering berprasangka buruk dimaksudkan sering terjadi komunikasi-komunikasi buruk didalam

masyarakat yang menyebabkan kadang-kadang masyarakat menduga yang tidak-tidak atau hal negatif. Serta terjadinya perbedaan pendapat, masyarakat Desa Blorong sangat beragam tentunya persepsi dari masyarakat juga beranekaragam sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Blorong. Keempat, kurangnya keterbukaan Pemerintah Desa, hal ini dapat berpengaruh terhadap kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah maka dapat menghambat proses penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi LPMD di Desa Blorong dalam melaksanakan pembangunan sudah berjalan namun belum optimal. Partisipasi lembaga ini ditunjukkan dengan keterlibatan dalam setiap tahapan pada pembangunan di Desa Blorong mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Berdasarkan partisipasi LPMD Desa Blorong dalam tahapan pembangunan tersebut, partisipasi LPMD dalam melaksanakan pembangunan di

Desa Blorong termasuk bentuk partisipasi langsung dan partisipasi kolektif. Selain itu, partisipasi LPMD di Desa Blorong dalam pelaksanaan pembangunan termasuk pada tingkatan *Consultation* (Konsultasi) sesuai teori Arnstein.

2. Partisipasi LPMD Desa Blorong dalam melaksanakan pembangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor yang mendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Faktor yang mendukung partisipasi LPMD di Desa Blorong dalam melaksanakan pembangunan antara lain adanya tunjangan bagi anggota LPMD, adanya peraturan mengenai LPMD, dukungan dari masyarakat, dan menyampaikan informasi yang belum diketahui oleh masyarakat.
 - b. Faktor yang dapat menghambat partisipasi LPMD di Desa Blorong dalam melaksanakan pembangunan antara lain pencairan dana bertahap, masih rendahnya kesadaran LPMD, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta kurangnya keterbukaan Pemerintah Desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat, dalam pencairan dana untuk desa sebaiknya Pemerintah Pusat lebih mempercepat agar program-program pembangunan di desa dapat cepat terealisasi dan mampu mensejahterakan masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Desa Blorong, dalam merencanakan skala prioritas sebaiknya Pemerintah Desa lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat serta adanya keterbukaan dari Pemerintah Desa mengenai alokasi anggaran agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran tersebut
3. Bagi anggota LPMD Desa Blorong dapat mengatur waktu kegiatan mereka diluar aktivitas sebagai anggota, agar anggota LPMD dapat membagi waktu antara pekerjaan sehari-hari dengan aktivitas mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota LPMD.
4. Bagi masyarakat Desa Blorong disarankan untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam pembangunan di desa, baik berupa ide atau usulan, tenaga dan alat-alat yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arnstein, Sherry R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. JAIP. Vol. 35 No. 4, Juli 1969: 216-224. Diperoleh pada 19 Mei 2016, dari <http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Miles, Mathew B. dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.Maryadi
- Ndraha, Taliziduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Pusida, Refli. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)*. Versi Elektronik. *Jurnal Politico*, 1 (5), 1-6. Diperoleh pada 03 April 2016, dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/5987>
- Slamet. (1993). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: UNS Press
- Sutopo, H. B. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa